

PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PENEGAKKAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH YANG BAIK PADA PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA DI RIAU

Taufeni Taufik

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam penegakkan tata kelola pemerintah daerah yang baik pada provinsi dan kabupaten/kota di Riau. Dengan jumlah responden 30 orang, yaitu ketua dan anggota team auditor BPK pada provinsi dan 9 kabupaten/kota di Riau. Untuk menguji signifikansi persamaan regresi digunakan uji varians (anova) uji F, dan diperoleh hasil uji signifikan $F_{hit} = 20,259 > F_{tab} = 4,196$ dan dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi adalah signifikan. Setelah pengujian signifikansi persamaan regresi kemudian dilanjutkan penghitungan koefisien korelasi sederhana X dengan Y (r_{YX}). Berdasarkan hasil penghitungan tersebut diperoleh r_{YX} sebesar 0,648. Tingkat hubungan kedua variabel masuk dalam kategori tinggi. Artinya keterkaitan antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan tata kelola pemerintah daerah kuat. Semakin baik peran Badan Pemeriksa Keuangan maka akan semakin baik tata kelola pemerintah daerah. Berdasarkan koefisien korelasi r_{YX} tersebut di atas diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,420. Hal ini berarti bahwa 42,0% Tata kelola pemerintah (Y) dipengaruhi oleh peran Badan Pemeriksa Keuangan.

Signifikansi Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam penegakkan Tata kelola pemerintah yang baik diuji melalui uji t. Nilai t_{tabel} diperoleh sebesar 2,048, sedangkan t_{hit} sebesar 4,501 lebih besar dari pada t_{tab} sebesar 2,048. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti terdapat peran yang signifikan dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam penegakkan Tata kelola pemerintah yang baik pada kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintah, dan Good Governance.

PENDAHULUAN

Tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 secara alami memunculkan kesadaran dan semangat yang besar untuk menegakkan tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan sektor publik yang dilakukan selama ini dengan menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan sektor publik tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional (Penjelasan atas UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Orde Baru telah mewariskan masyarakat madani yang berantakan karena tidak tegaknya tata kelola pemerintah yang baik.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa tata kelola pemerintah Indonesia tidak berjalan dengan baik, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Jeff Hunter dan Anwar Shah, (1998) dengan mengelompokkan 80 negara ke dalam : *good governance*, *fair governance*, dan *poor governance* berdasarkan *governance quality index*. Berdasarkan penelitian tersebut Indonesia dikategorikan *poor governance*, disejajarkan dengan Cina, Nepal dan Pakistan. Sedangkan Singapura, Jepang, Malaysia,

Korea Selatan, Sri Lanka , Philippina, India, Thailand masuk kategori tata kelola yang baik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Booz-Allen and Hamilton (2000), dengan mengelompokkan negara di Asia Tenggara menjadi : *good governance* dan *poor governance*, berdasarkan Indeks Efisiensi Peradilan, Indeks Korupsi, Indeks tata kelola. Indonesia dikategorikan negara dengan *poor governance* dengan besaran indeks efisiensi peradilan 2,50, indeks korupsi 2,15, dan indeks tata kelola 2,88. Sedangkan Malaysia dan Singapura di kategorikan *good governance* (tata kelola yang baik).

Kemudian *Transparansy International* (TI) (2005), juga melakukan penelitian dengan hasil bahwa peringkat korupsi di Indonesia berada pada posisi *rangking* 137 dari 158, dengan nilai indeks prestasi korupsi (IPK) 2,2. Pada tahun 2006 IPK Indonesia 2,4, sedangkan Singapura (9,4), Hongkong (8,3), Jepang (7,6), Taiwan (5,9), Korea Selatan (5,1) dan Malaysia (5,0) jauh berada di atas Indonesia. Menurut *Transparency International* (TI) (2006) indeks prestasi korupsi (IPK), negara-negara miskin dirangking indeks yang rendah dibawah 5 (lima). Ini memberi indikasi, terdapat korelasi yang kuat antara korupsi dan kemiskinan, dengan temuan bahwa hampir tiga perempat negara-negara yang disurvei dalam IPK 2006 memperoleh skor dibawah lima.

Dari data *transparency International* dan hasil penelitian tentang *good governance* di atas maka dapat dilihat bahwa negara yang tata kelola yang baik (*good governance*) menunjukkan indeks persepsi korupsi yang tinggi. Jika dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, negara-negara yang pertumbuhan ekonominya lebih baik ternyata lebih mampu memberantas korupsi karena investasi dan bisnis hanya bisa bertumbuh di negara-negara yang *good governance* dan *good corporate governance* berjalan baik (*Transparency International*, 2006) .

Bergulirlah transisi sistem pemerintahan dari yang otoriter dan tertutup menuju sistem yang terbuka dan demokratis, membawa tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Disinilah BPK menemukan jalan untuk meraih kembali kedudukan dan perannya yang sejati, BPK dalam menjalankan tugas konstitusionalnya menjadi semakin kokoh dengan adanya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang memaklumkan pemulihan independensi BPK. Perubahan itu memperluas pengaturan tentang BPK dari hanya satu ayat (Ayat 5) Pasal 23 pada Bab VIII, menjadi satu bab tersendiri, yaitu Bab VIIIA yang terdiri dari tiga pasal, yakni Pasal 23E, 23F, dan 23G, yang keseluruhannya berisi tujuh ayat.

Selain itu sebagai pelaksanaan Pasal 23C, Pasal 23E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan perubahan konsitusi penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah, peraturan perundang-undangan dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK tidak memadai sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Landasan bagi kedudukan BPK semakin mantap dengan keluarnya Undang-Undang tersebut. Dengan undang-undang ini, secara formal independensi BPK telah terpulihkan. Yang lebih penting, tentu saja BPK semakin dekat pada harapan para pendiri bangsa, yang mendambakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penegakan Pemerintahan yang Bersih dan Tata kelola yang Baik. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka diajukan judul penelitian Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Penegakkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau.

Rumusan masalah penelitian ini adalah ; Apakah Badan pemeriksa keuangan berperan dalam penegakkan tata kelola pemerintah daerah yang baik pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Tujuan Penelitian adalah untuk mencari bukti empiris mengenai peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam penegakkan tata kelola pemerintah daerah yang baik pada provinsi dan kabupaten/kota di Riau.

Dalam perubahan ketiga Bab VIIIA UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 23 E dinyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Dalam melakukan tugasnya, BPK berkewajiban untuk mematuhi standar pekerjaan dan standar perilaku. Standar pekerjaan BPK diatur dalam standar pemeriksaan keuangan negara, yang dimuat dalam Peraturan BPK RI NO. 01 Tahun 2007. Standar perilaku BPK dimuat, dalam Peraturan BPK RI NO. 02 Tahun 2007 tentang Kode etik BPK.

Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD. Dan Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 23 F dinyatakan anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinan BPK dipilih dan oleh anggota. Lingkup pemeriksaan BPK adalah : 1). Pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan pusat dan pemerintah daerah, 2).Pemeriksaan Kinerja yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas, 3). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung (Penjelasan atas UU RI Nomor 15 Tahun 2004).

Di era Orde Baru, BPK dan lembaga tinggi negara yang lain yaitu DPR, MA dan DPA tampaknya tidak mampu mengemban tugas dan fungsinya dengan baik. Dominasi dari eksekutif demikian kuatnya, sehingga hampir seluruh lembaga kenegaraan yang ada lebih banyak berperan sebagai subordinat Pemerintah. Dalam periode tersebut, lembaga tinggi negara yang ada telah terjebak, baik sengaja atau tidak sengaja dalam suatu paradigma pemihakan kepada penguasa yang ternyata telah menyalah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan yang sempit. Pada waktu itu BPK sebagai pemeriksa eksternal yang seharusnya independen, cenderung dibatasi wewenangnya melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan tertutup. Sulit sekali bagi masyarakat untuk memperoleh penilaian yang sederhana dari BPK mengenai kinerja Pemerintah.

Dalam pasal 23 ayat (5) kalimat ke dua UUD 1945 yang asli (sebelum perubahan), memang berbunyi “Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR”. Tapi dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam pasal 23E ayat (2) terjadi perubahan yaitu kata “diberitahukan” telah diganti dengan kata “diserahkan”, akan tetapi secara lebih luas yaitu selain kepada DPR, juga kepada Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tentunya lembaga legislatif tersebut dapat mempublikasikannya kepada publik sesuai dengan misi yang diembannya sebagai wakil rakyat. Dominasi Pemerintah terhadap BPK sangat menonjol, yang dicirikan adanya kebiasaan bagi BPK untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan Presiden tentang hal-hal yang akan dimuat dalam buku hasil pemeriksaan BPK yang akan disampaikan kepada DPR. Terjadilah proses penyortiran terhadap temuan-temuan BPK. Maka tidak heran apabila kemudian laporan BPK menjadi kurang menarik bagi masyarakat. Isi laporan itu kurang mencerminkan harapan publik yang dalam kehidupan sehari-hari sehari – hari sangat merasakan adanya ketidakberesan dalam manajemen keuangan negara. Adanya jurang antara harapan masyarakat dengan realita peran BPK ditambah kesan ketertutupan BPK pada waktu itu, menjadikan BPK jauh dari masyarakat. Kalaupun demikian ada argumentasi bahwa BPK telah berkomunikasi dengan masyarakat melalui wakilnya di DPR, ternyata lembaga DPR pada periode tersebut tidak lebih hanya berperan sebagai pemberi stempel kebijakan Pemerintah. DPR sama sekali tidak mewakili

masyarakat karena pemilihan keanggotaannya melalui proses.

Beralihnya sistem pemerintahan dari pemerintahan yang otoriter menjadi pemerintahan bersistem demokrasi, maka pelan tapi pasti BPK telah mengubah paradigmanya dari paradigma lama yang berpihak pada kekuasaan menjadi paradigma baru yang mengarah pada terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang bercirikan prinsip-prinsip universal antara lain penerapan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), yakni sistem dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip “supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas”, serta memiliki komitmen tinggi terhadap tegaknya nilai dan prinsip “desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang baik, bertanggungjawab dan berdaya saing (Mustopadjaja AR, 2002). Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan terhadap penegakkan tata kelola pemerintah daerah yang baik pada provinsi dan kabupaten/kota di Riau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory survey* yaitu penelitian dengan menggunakan populasi untuk menjelaskan hubungan antar variabel pada populasi tersebut. Kuesioner penelitian diberikan kepada tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Riau, yang melakukan audit pada provinsi dan 9 kabupaten/kota di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kotamadya Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kotamadya Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dengan jumlah 30 orang.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 31 UU RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dinyatakan BPK dan/atau pemeriksa menjalankan tugas pemeriksaan secara bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK berkewajiban untuk menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dan mematuhi kode etik pemeriksa, dan melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik

Dalam penelitian ini diambil tiga pilar utama tata kelola yang baik menurut (KPK, 2003) yaitu terdiri dari : transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. (Bapenas & Depdagri, 2002). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2003). Partisipasi, adalah setiap warga mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (LAN-RI, 2003).

Metode Pengujian Data

1. Uji Kesahihan (*Test of Validity*) dan Uji Keandalan (*Test of Reliability*)

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi *Rank Spearman* (Siegel, 1997 :250), Dengan tingkat keyakinan 95 % ($\alpha = 0,05$), maka jika : signifikansi koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya, dan apabila koefisien korelasinya $> 0,30$ (Kaplan-Saccuzza; 1993) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Jika koefisien korelasi $< 0,30$ berarti data yang bersangkutan tidak valid. Sedangkan Uji reliabilitas menggunakan rumus *Spearman-Brown*.

2. Uji Normalitas

Sebelum melakukan analisis regresi untuk melihat pengaruh antar yang diteliti dilakukan pengujian distribusi dat (normalitas) sehingga dapat ditentukan metode statistik yang sesuai. Untuk mengetahui normalitas data yang digunakan dalam pengujian hipotesis dilakukan normalitas *Kolmogorov-Smirnov* ($\alpha=0,05$).

H_0 : data berdistribusi normal.

H_1 : data tidak berdistribusi normal. Kesimpulan diambil berdasarkan kriteria

H_0 : diterima yang berarti data berdistribusi normal jika nilai sign (p) $> \alpha$ (0,05).

3. Analisis Data

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan penghitungan regresi linear sederhana untuk mengetahui hubungan kausalitas (peran) BPK (X) terhadap Tata kelola pemerintah (Y). Persamaan regresi yang digunakan : $Y = a + b_1X_1 + e$.

4. Pengujian Asumsi Regresi

Pengujian asumsi regresi dilakukan untuk melihat validitasi persamaan regresi karena model regresi diperoleh melalui penaksiran menggunakan metode estimasi *Ordinary Least Square* (OLS). Asumsi yang diuji untuk model regresi ini adalah normalitas residual nilai taksiran model regresi dan asumsi tidak terjadi heterogenitas varians (asumsi heteroskedastisitas). Uji Normalitas Residu. Pengujian normalitas residu dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi yang mensyaratkan residual nilai taksiran model regresi harus berdistribusi normal.

Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan Uji Kolmogorov- Smirnov. Sedangkan uji Asumsi Bebas Heterokedastisitas. Heteroskedastisitas merupakan indikasi bahwa varians residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Pengujian homogenitas varian dari residual model regresi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan uji Korelasi Rank Spearman.

5. Pengujian Hipotesis

Secara statistik, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$H_0 : \rho_{YX} = 0$: Tidak terdapat Peran BPK dalam penegakkan Tata kelola pemerintah daerah yang baik pada provinsi dan kabupaten/kota di Riau

$H_{a1} : \rho_{YX} \neq 0$: Terdapat peran BPK dalam penegakkan Tata kelola pemerintah daerah yang baik pada provinsi dan kabupaten/kota di Riau

Uji signifikansi persamaan regresi digunakan uji varians (anava)- uji F. Kriteria signifikansi, jika F_{hit} lebih besar dari pada F_{tab} maka persamaan regresi tersebut dinyatakan signifikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penghitungan uji normalitas data masing-masing variabel penelitian, dengan bantuan program *SPSS for Windows*. dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1 : Hasil Uji Normalitas Data Variabel Hasil Penelitian One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	BPK (X)	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Y)
N	30	30
Normal Parameters ^{a,b} Mean	2.4790735	2.9620811
Std.Deviation	.50083816	.67470381
Most Extreme Absolute	.150	.119
Differences Positive	.150	.119
Negative	-.109	-.101
Kolmogorov-Smirnov Z	.824	.650
Asymp. Sig. (2-tailed)	.506	.792

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Keterangan : Signifikansi (p) $\geq 0,05$ = data berdistribusi normal

Signifikansi (p) $< 0,05$ = data tidak berdistribusi normal

Diperoleh dari hasil penghitungan uji Normalitas untuk data X, d hitung sebesar 0,150 dengan signifikansi (p) adalah 0,506. Diperoleh nilai signifikansi berada di atas 0,05. Hal ini berarti data Badan Pemeriksa Keuangan berdistribusi normal.

Diperoleh dari hasil penghitungan uji Normalitas untuk data Y, d hitung sebesar 0,119 dengan signifikansi (p) adalah 0,792. Diperoleh nilai signifikansi berada di atas 0,05. Hal ini berarti data Tata kelola pemerintah dalam keadaan berdistribusi normal.

Hasil Analisis Regresi

Hasil perhitungan koefisien regresi dan persamaan regresi diperoleh sebagai berikut :

Tabel 2 : Hasil Regresi X terhadap Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	g.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.798	.490		1.629	.115
BPK (X)	.873	.194	.648	4.501	.000

a. Dependent Variable: Tata kelola pemerintah (Y)

Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh koefisien regresi b sebesar 0,873 dan nilai konstanta sebesar 0,798 sehingga hubungan kausal antara BPK dengan Tata kelola pemerintah dinyatakan dalam persamaan garis regresi : $\hat{Y} = 0,798 + 0,873 X$. Hal ini berarti bahwa apabila Badan Pemeriksa Keuangan ditingkatkan satu skor maka Tata kelola pemerintahan akan meningkat 0,873 pada konstanta 0,798. Hal ini berarti apabila Badan Pemeriksa Keuangan semakin baik maka Tata kelola pemerintah akan meningkat.

Hasil Pengujian Asumsi Regresi

Hasil Uji Normalitas Residu.

Hasil perhitungan uji normalitas residual dari persamaan taksiran yang diperoleh menggunakan SPSS dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 : Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.51393095
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.077
	Negative	-.109
Kolmogorov-Smirnov Z		.600
Asymp. Sig. (2-tailed)		.865

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Lampiran Output SPSS

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai $D_{hitung} = 0,109$ dengan p-value (nilai sig) sebesar 0,865. Diperoleh dari hasil penghitungan uji Normalitas untuk data nilai residual dari model, nilai signifikansi (p) adalah 0,865 berada di atas 0,05. Hasil pengujian normalitas model regresi menunjukkan bahwa nilai residual dari model berdistribusi normal.

Hasil Uji Asumsi Bebas Heterokedastisitas.

Hasil pengujian asumsi bebas heterokedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 : Uji Heteroskedastisitas Correlations

			BPK (X)	absR_XY
Spearman's rho	BPK (X)	Correlation Coefficient	1.000	.220
		Sig. (2-tailed)		.243
		N	30	30
	Abs_XY	Correlation coefficient	.220	1.000
		Sig. (2 –tailed)	.243	
		N	30	30

Sumber : Lampiran Output SPSS

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari residual homogen (tidak terdapat heteroskedastisitas). Hal ini ditunjukkan oleh hasil korelasi X dengan nilai absolut dari residual (error) tidak signifikan pada level 5%. Diperoleh nilai signifikansi untuk X sebesar 0,243 (nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sebagai batas tingkat kekeliruan).

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Penghitungan uji signifikansi dan linearitas persamaan regresi dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5 : Tabel ANOVA untuk Uji Signifkansi Persamaan Regresi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.542	1	5.542	20.259	.000 ^a
	Residual	7.660	28	.274		
	Total	13.202	29			

a. Predictors: (Constant). Badan Pemeriksa Keuangan(X)

b. Dependent Variable: Tata kelola pemerintah daerah yang baik (Y)

Dari tabel F dengan jumlah sampel (n) = 30; diperoleh nilai F_{tabel} dengan $db_1 = 1$ dan $db_2 = 28$ sebesar 4,196. Berdasarkan Tabel 5 di atas diperoleh hasil uji signifikan karena $F_{\text{hit}} = 20,259 > F_{\text{tab}} = 4,196$ dan dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi $\hat{Y} = 0,798 + 0,873 X$ adalah signifikan. Setelah pengujian signifikansi persamaan regresi kemudian dilanjutkan penghitungan koefisien korelasi sederhana X dengan Y (r_{YX}). Berdasarkan hasil penghitungan tersebut diperoleh r_{YX} sebesar 0,648. Tingkat hubungan kedua variabel masuk dalam kategori tinggi. Artinya keterkaitan antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan tata kelola pemerintah kuat. Semakin baik peran Badan Pemeriksa Keuangan maka akan semakin baik tata kelola pemerintah. Berdasarkan koefisien korelasi r_{YX} tersebut di atas diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,420. Hal ini berarti bahwa 42,0% Tata kelola pemerintah (Y) dipengaruhi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Signifikansi peran BPK dalam penegakkan Tata kelola pemerintah diuji melalui melalui uji t dengan hasil yang diperoleh seperti dalam Tabel 6.

Tabel 6 : Hasil Penghitungan Korelasi X dengan Y

Korelasi	N	B	r	R^2	T_{hit}	T table (0,05)
----------	---	---	---	-------	------------------	----------------

X dengan Y	30	0,873	0,648	0,420	4,501	2,048
------------	----	-------	-------	-------	-------	-------

Nilai t_{tabel} dengan jumlah sampel (n) = 30; jumlah variabel (k) = 1; taraf signifikan α = 5%; derajat bebas (db) = $n-k-1 = 30-1-1 = 28$ diperoleh sebesar 2,048. Pada tabel atas ditunjukkan t_{hit} sebesar 4,501 lebih besar dari pada t_{tab} sebesar 2,048. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Tata kelola pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan kedua variabel masuk dalam kategori tinggi, artinya keterkaitan antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan tata kelola pemerintah daerah kuat. Semakin baik peran Badan Pemeriksa Keuangan maka akan semakin baik tata kelola pemerintah daerah pada provinsi, kabupaten/kota di Riau. Berdasarkan koefisien korelasi r_{yx} diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,420. Hal ini berarti bahwa 42,0 % tata kelola pemerintah dipengaruhi oleh peran Badan Pemeriksa Keuangan.

Signifikansi Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam penegakkan Tata kelola pemerintah yang baik diuji melalui uji t. Nilai t_{tabel} diperoleh sebesar 2,048, sedangkan t_{hit} sebesar 4,501 lebih besar dari pada t_{tab} sebesar 2,048. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti terdapat peran yang signifikan dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam penegakkan Tata kelola pemerintah yang baik pada kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Dari hasil penelitian diajukan saran supaya Badan Pemeriksa Keuangan dapat meningkatkan integritas dan efektivitas pemeriksaan pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada provinsi dan kabupaten/kota di Riau dengan harapan bisa menegakkan tata kelola pemerintah yang baik di Provinsi Riau. Bagi Peneliti dan pihak-pihak lain yang tertarik melakukan penelitian dengan topik terkait dengan penelitian ini, dapat menggali faktor-faktor lain yang mempengaruhi tata kelola pemerintah daerah yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Nasution. 2007. *Peranan BPK Dalam Mewujudkan Cita-Cita Reformasi Sistem Sosial Indonesia*, Pidato Ulang Tahun Ke 60, BPK.
- Anwar Shah, Jeff Huther, 1998, *Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate on Fiscal Decentralization*, World Bank, USA
- Bintoro Tjokroamidjojo. 2000. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Yakarta : Penerbit Universitas Indonesia. UI-Press.
- BPK RI, 2006. *Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II tahun 2006 atas Belanj.investigasi.Pemeriksaan on Call. dan pada Provinsi Riau Tahun Anggaran 2005 dan 2006*. BPK- Perwakilan Riau. di Pekanbaru. =
- _____. 2006. *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta
- _____. 2007. *Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester I tahun 2007 atas Laporan Keuangan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 di Pekanbaru*. BPK- Perwakilan Riau. di Pekanbaru.
- _____. 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. NO.01 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta.
- _____. 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. NO. 02 Tahun 2007 tentang *Kode Etik BPK RI*. Jakarta.

- BPKP, 2000. *Pengukuran Kinerja Suatu Tinjauan Pada Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- _____. 2002. *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Partisipasi BPKP dalam Mengembangkannya*. Jakarta; pg 33.
- D.Wayne Taylor. 2000. *Facts, myths and monsters ; understanding the principles of good governance*. The international Journal of Public Sector Management. Vol. 13. Iss. 2; pg 1-14.
- Gandhi. 2003. *Pengaruh Pemeriksaan Intern. Pemeriksaan Ekstern dan Penilaian DPR terhadap Akuntabilitas Keuangan Departemen (suatu survey pada Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPK. DPR dan Departemen)*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran. Bandung.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Penerbit Insan Cendekia.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas Dan Good Governance. Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Yakarta : Penerbit LAN.
- _____. 2000. *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Modul 3 dari 5. Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta : Penerbit LAN.
- _____. 2000. *Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah. Modul 4 dari 5. Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta : Penerbit LAN.
- _____. 2000. *Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Modul 5 dari 5. Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta : Penerbit LAN.
- Marlis Bustami. 2003. *Esensi Pemeriksaan Keuangan Negara Dalam Upaya Mewujudkan Good Government Dan Clean Government*. Pemeriksa No. 89 April- Mei.
- ‘Mustopadidjaja. AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Yakarta : Penerbit Lembaga Administrasi Negara Duta Pertiwi Foundation. dicetak PERUM Percetakan Negari RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- _____. Nomor 108 tahun 2000 tentang *Pertanggungjawaban Kepala Daerah*.
- _____. Nomor 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- _____. Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. Nomor 79 tahun 2005 tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- _____. Nomor 8 tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomo r 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah*.
- PERC.2007. *PERC The Anual Graft Ranking Survey*. www.perc.com.
- Transparency International. 2005. *Corruption perceptions index*. WWW. Transparency.org/survey/# cpi or www. Icgg.org.
- Transparency International Indonesia. 2006. *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, Survei Di Antara Di 32 Wilayah Indonesia*.
- Undang –Undang RI, 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- _____. 1 tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- _____. 15 tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- _____. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- _____. Dasar 1945 & Perubahannya, Susunan Kabinet RI Lengkap(1945-2009),

Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, 2009, Redaksi Kawan Pustaka, Jakarta

_____. 15 tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.